

## **ANALISIS VIDIO**

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan  
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.  
2. Drs. Rapani, M.Pd.



Disusun Oleh:

Deasy Alya Safitri ( 2413053215 )

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

## **SUPREMASI HUKUM**

*Oleh Dr. Didin Widyantono, M.Pd.*

Video ini membahas pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam konteks masyarakat modern. Hukum berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara serta masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, hukum alam cukup untuk mengatur kehidupan, tetapi dalam masyarakat modern yang kompleks, hukum harus lebih terstruktur dan tidak hanya bergantung pada hukum adat atau hukum internasional. Kehidupan modern dan kemajuan teknologi memerlukan struktur hukum baru yang dapat mendukungnya, menjadikan hukum modern sebagai pranata sosial politik yang penting dalam menghadapi kompleksitas dunia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menekankan pentingnya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan negara hukum yang dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi rakyat. Tanpa sistem hukum yang baik, Indonesia berisiko menjadi sarang korupsi, di mana para koruptor dapat memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi. Penegakan hukum yang keliru dapat menyebabkan malapetaka, terutama jika hanya mengikuti teks undang-undang tanpa pemahaman yang mendalam.

Reformasi sejak tahun 1998 menandai babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, di mana demokratisasi dan desentralisasi telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum. Munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum, berperan penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Inti secara keseluruhan, penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan keterlibatan masyarakat serta reformasi hukum yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.